

**KEEFEKTIFAN PENERIMAAN SEKTOR KEHUTANAN
PRODUKSI GETAH PINUS DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA**

S K R I P S I



DENDI HARDIYANTI SOPHIAN


**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 2468/UN36.6/PI/2016, tanggal 22 Mei 2016 untuk membimbing Saudara:


Nama : Dendi Hardiyanti Sophian
NIM : 1265142007
Program Studi : Ilmu Administrai Negara
Judul Skripsi : Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan
Produksi Getah Pinus dalam Maningkatkan
Pendapatan Asli di Kabupaten Gowa

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassa.:

 Pembimbing I

Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si
NIP. 19510925 197602 1 001

Makassar, Agustus 20116

 Pembimbing II

Ismail, S.Pd., M.Si
NIP. 19790909 201012 1 004

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 5341/UN36.6/KM/2016 tanggal 07 September 2016 untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada hari Jumat 16 September 2016.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum.
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

1. Ketua : Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum (.....)
2. Sekretaris : Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si (.....)
3. Pembimbing I : Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si (.....)
4. Pembimbing II : Ismail, S.Pd., M.Si (.....)
5. Penguji I : Dr. Muhammad Guntur, M.Si (.....)
6. Penguji II : Dr. Muh Nur Yamin, M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dendi Hardiyanti Sophian
Nim : 1265142007
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang. 17 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Getah Pinus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa

Dengan pembimbing masing-masing:

1. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si
2. Ismail, S.Pd., M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

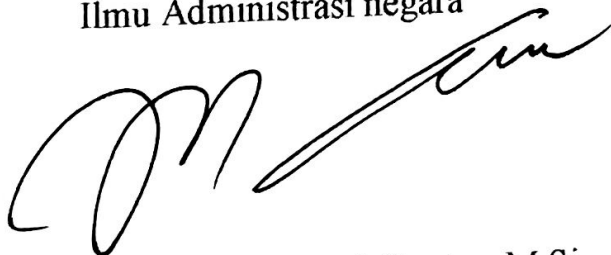
Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya siap dituntut dalam maupun luar pengadilan dan menanggung resiko yang diakibatkannya.

Makassar, 3 Oktober 2016

Diketahui oleh:

Ketua Program studi
Ilmu Administrasi negara



Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011

Yang membuat pernyataan



Dendi Hardiyanti Sophian
NIM. 1265142007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dendi Hardiyanti Sophian
Nim : 1265142007
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang. 17 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Getah Pinus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa

Dengan pembimbing masing-masing:

1. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si
2. Ismail, S.Pd., M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

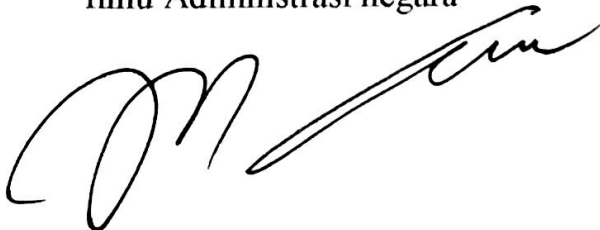
Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya siap dituntut dalam maupun luar pengadilan dan menanggung resiko yang diakibatkannya.

Makassar, 3 Oktober 2016

Diketahui oleh:

Ketua Program studi
Ilmu Administrasi negara



Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011

Yang membuat pernyataan



Dendi Hardiyanti Sophian
NIM. 1265142007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alamat. Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105
Website : <http://ian.unm.ac.id>

USUL PROPOSAL PENELITIAN/PENULISAN SKRIPSI

A. IDENTITAS

1. Nama : Dendi hardiyanti Sophian
2. Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 17 januari 1994
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265142007
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

B. FOKUS PENELITIAN

- ☐ Kebijakan Publik
☐ Pelayanan Publik
☒ Administrasi Pembangunan

C. JUDUL SKRIPSI YANG DIUSULKAN.

- ① Potensi Kehutanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa
2. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di kab.Gowa.
3. Pengaruh mutasi terhadap semangat kerja pegawai negeri sipil di KPKNL Makassar.

Makassar, 11 November 2015

Diketahui Oleh:

Penasehat Akademik,

Mahasiswa yang bersangkutan

Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si

NIP. 19510925 197602 1 001

Dendi Hardiyanti Sophian

NIM. 1265142007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alamat. Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105
Website : <http://ian.unm.ac.id>

PERSETUJUAN JUDUL DAN CALON PEMBIMBING


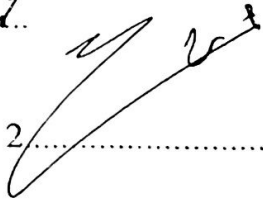
A. IDENTITAS

1. Nama : Dendi hardiyanti Sophian
2. Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 17 januari 1994
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265142007
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

B. JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI

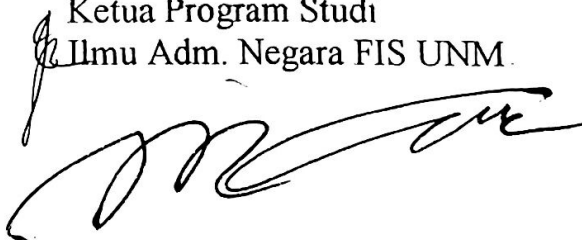
POTENSI KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BOWA

C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

No.	Nama Pembimbing/NIP	Tanda Tangan
1	DR. MAHARUDDIN PANGWA, M.Si NIP. 19510925 197602 1 001	1. 
2	ISMAIL DJAFAR S.Pd., M.Si NIP. 19790909 201012 1 004	2. 

Makassar, 1 Desember 2015

Ketua Program Studi
Ilmu Adm. Negara FIS UNM.



Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011

**KEEFEKTIFAN PENERIMAAN SEKTOR KEHUTANAN
PRODUKSI GETAH PINUS DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA**

S K R I P S I

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara

DENDI HARDIYANTI SOPHIAN

1265142007

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 2468/UN36.6/PI/2016, tanggal 22 Mei 2016 untuk membimbing Saudara:

Nama : Dendi Hardiyanti Sophian
NIM : 1265142007
Program Studi : Ilmu Administrai Negara
Judul Skripsi : Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan
Produksi Getah Pinus dalam Maningkatkan
Pendapatan Asli di Kabupaten Gowa

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Makassar, Agustus 20116

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si
NIP. 19510925 197602 1 001

Ismail, S.Pd., M.Si
NIP. 19790909 201012 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dendi Hardiyanti Sophian
Nim : 1265142007
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 17 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Getah Pinus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa

Dengan pembimbing masing-masing:

1. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si
2. Ismail, S.Pd., M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya siap dituntut dalam maupun luar pengadilan dan menanggung resiko yang diakibatkannya.

Makassar, 3 Oktober 2016

Diketahui oleh:

Ketua Program studi
Ilmu Administrasi negara

Yang membuat pernyataan

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011

Dendi Hardiyanti Sophian
NIM. 1265142007

MOTO

Jangan membandingkan diri Anda dengan siapapun didunia ini, jika anda melakukannya, Anda menghina diri sendiri.

(Bill Gates)

Berusahalah semampunya, jangan memaksakan diri dan tetap ikuti kata hati.

(Dendi Hardiyanti Sophian)

Karyaku ini kupersembahkan kepada Allah SWT

dan Nabi Muhammat SAW

Kepada kedua orang tua dan keluargaku,

Kepada sahabat, teman-teman mahasiswa dan kepada semua

yang memahami ilmu ini dan mengamalkannya

Semoga memberikan berkah Amin

ABSTRAK

Dendi Hardiyanti Sophian. 2016. Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Getah Pinus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah kabupaten Gowa. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si dan Ismail, S.Pd., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Getah Pinus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujian kesimpulan, dan pengujian dan keabsahan data.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa belum terlaksana dengan efektif. Dilihat dari aspek Adaptasi terhadap kurangnya tenaga kerja penyadap dan iklim yang tidak dapat diatasi. Integrasi terhadap sosialisasi yang belum berdampak baik bagi para masyarakat dan para penyadap, sehingga masih adanya pelanggaran terhadap proses penyadapan yang tidak ditanggapi oleh dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa. Motivasi terhadap sarana dan prasarana yang masih bersifat milik pribadi dan jumlah sumber daya yang masih kurang. Namun pada aspek Produksi mengenai hasil yang berkualitas dilihat dari meningkatnya pendapatan asli daerah dan membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan yang berprofesi sebagai petani dalam proses penyadapan getah pinus.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Hasil Getah Pinus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas: Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian, Bab II berisikan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, Bab III berisi metode penelitian yang menguraikan jenis dan disain penelitian, fokus dan deskripsi fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, Bab V berisi kesimpulan dan saran.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2011-2016.
2. Bapak Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP, Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2016-2021.

3. Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar sekaligus selaku Penanggung I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Ibu Dra. Herlina Sakawati, M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara..
6. Bapak Dr. Maharuddin Pangewa M.Si Selaku Pembimbing 1 yang dengan segala kesabaran dan ketekunan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis terutama dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis betul-betul merasakan kepedulian beliau dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ismail, S.Pd.,M.Si Selaku Pembimbing II yang dengan segala kesabaran dan ketekunan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis terutama dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis betul-betul merasakan kepedulian beliau dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Nur Yamin M.Si selaku Penanggung II yang telah memberikan petunjuk dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Para dosen dan staf administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial yang telah mendidik penulis selama dalam proses perkuliahan.

10. Kak Sulmiah, S.Pd., M.A.P, Kak Muhammad Nur, S.Pd., M.AP dan Kak Muh. Lutfi Siraj, Spd., M.Pd., atas saran dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
11. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin penelitian.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa
13. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terkhusus Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah beserta staf, atas izin dan pemberian datanya.
14. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa beserta staf atas izin dan pemberian data serta bersedia menjadi informan.
15. Kepada bapak H. Sabaruddin S.Hut selaku staf Bagian Pendapatan Asli Daerah yang senang tiasa membatu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
16. Para sahabat-sahabatku yang tetap setia hingga saat ini masih menyemangati dan selalu ada dalam suka maupun duka untuk penulis.
17. Sahabat sekaligus saudara tercinta Putri Eka Pratiwi Nugroho, Dian Hafizah Zaitun, Nini Andriani dan Nurhaera Yahya yang tetap setia menyemangati dan selalu ada dalam suka maupun duka untuk penulis.
18. Teman-teman KKN di Desa Bonto yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulis menyelesaikan skripsi.
19. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2012 yang telah memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi.

20. Terkhusus kepada kedua orang tua St. Roslina Patau S.Pd dan Ir. Muh. Zulfikar Sophian yang selalu menjadi panutan terhadap anak-anaknya serta beribu-ribu do'a yang tak terputus-putus, selalu memberikan arahan pesan yang sangat bermakna dalam hidup ini dan kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa.

21. Terakhir kepada saudara-saudaraku yang senang tiasa mendoakan kelancaran penulisan skripsi penulis

Semoga segala bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
MOTTO	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka	8
1. Konsep Keefekifan	8
2. Konsep Pendapatan Asli Daerah	12

3. Potensi Sektor Kehutanan	16
B. Kerangka Konseptual	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	21
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian	22
E. Jenis dan Sumber Data	23
F. Instrumen Penelitian.....	25
G. Prosedur Pengumpulan Data	25
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	26
I. Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	37
1. Adaptasi	38
2. Integrasi	41
3. Motivasi	46
4. Produksi	50
C. Pembahasan	52
1. Adaptasi	54
2. Integrasi	55
3. Motivasi	56

4. Produksi	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi.....	61
C. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Realisasi Penerimaan PAD 2011-2014	5
2.	Presentase Realisasi Penerimaan PAD 2011 - 2015.....	54

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Konseptual.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Matriks Penelitian	65
2.	Pedoman Wawancara	66
3.	Matriks Pedoman Wawancara.....	68
4.	Daftar Nama Informan	72
5.	Matriks Data Hasil Wawancara.....	73
6.	Usulan Judul Skripsi.....	84
7.	Persetujuan Judul dan Calon Pembimbing.....	85
8.	Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing.....	86
9.	Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian	87
10.	Izin Penelitian BKPM Provinsi Sulawesi Selatan.....	88
11.	Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Kab.Gowa.....	89
12.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	90
13.	Struktur Organisasi	91
14.	Peraturan Daerah Kab. Gowa Nomor 17 Tahun 2011	92
15.	Rekomendasi Surat Izin Penyadapan Getah Pinus	96
16.	Perjanjian Kerja Sama Penyadapan Getah Pinus	97
17.	Revisi Perjanjian Kerja Sama Penyadapan Getah Pinus	98
18.	Dokumentasi	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan merupakan acuan pokok dalam penyelenggaraan kehutanan, baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah (kabupaten/kota). Hal ini bertujuan untuk menjamin keberadaan hutan, optimalisasi fungsi hutan serta distribusi manfaat secara adil dan berkelanjutan. Dalam prakteknya, pelaksanaan undang-undang tersebut seringkali tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan lebih menitikberatkan kepada aspek-aspek pengelolaan hutan yang ideal. Pada sisi lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, lebih menitikberatkan kepada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kondisi awal dari perjalanan otonomi daerah tersebut, menunjukkan bahwa, ternyata berbagai persoalan yang ada menyangkut upaya sebagian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi ini menimbulkan tekanan bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan tambahan pendapatan dengan mengenakan pajak dan retribusi baru. Salah satu sektor yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD adalah sektor kehutanan. Dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya hutan diharapkan lebih demokratis dan hasilnya langsung dapat dinikmati oleh daerah secara lebih merata. Pemerintah Daerah berusaha memacu pemasukan bagi PAD dari berbagai

sektor di wilayahnya termasuk di dalam sektor kehutanan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah tidak saja berhak mengelola sumber daya hutan di wilayahnya, namun juga harus bertanggungjawab memelihara kelestarian sumber daya tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, maka kelestarian sumber daya hutan akan sulit diwujudkan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memiliki hak-hak dan kewajiban. Beberapa hak yang diberikan kepada daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Kewajiban yang harus dilakukan oleh daerah yaitu diantaranya melestarikan lingkungan hidup serta mewujudkan keadilan dan pemerataan. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk

pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- (Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004)¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa sektor kehutanan. Pemerintah menyadari bahwa sektor kehutanan merupakan salah satu sektor penyumbang dalam pendapatan daerah dan berpotensi dalam meningkatkan PAD.

Hasil Pendapatan Asli Daerah satu-satunya yang terletak di Kabupaten Gowa dalam bidang kehutanan yaitu hasil hutan bukan kayu yang terdapat pada hutan

¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

pinus, dimana hutan pinus yang tidak hanya digunakan sebagai kawasan wisata tapi juga digunakan sebagai salah satu lahan untuk mata pencaharian warga dan hasil untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa. Upayanya yaitu penyadapan getah pinus yang dilakuakn oleh salah satu perusahaan swasta serta dikelola dan digunakan sebagai hasil untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspita Siti Sari (2010) dengan judul Pengaruh Kinerja Dinas Kehutanan dalam Pengelolaan Potensi Hutan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padeglang Tahun 2009. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan hutan belum cukup maksimal untuk SDA, pengaruh terhadap kinerja Dinas Kehutanan dalam pengelolaan Kehutanan di Kabupaten Padeglang. Dengan anggaran yang relatif rendah tersebut tentunya hasil yang rendah diperoleh dari pengelolaan hutan.²

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Guruh Afriantho (2008) dengan judul Prospek Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Hasil penelitiaanya menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan hutan yang sudah cukup maksimal disetiap kecamatan di Kabupaten Bogor, dikarenakan potensi kehutanan rata-rata kesediaan membayar masyarakat, ijin tebang dan ijin angkut, sehingga tidak melanggar aturan yang

²Sari Puspita Siti. 2010. *Pengaruh Kinerja Dinas Kehutanan dalam Pengelolaan Potensi Hutan Terhadap Prnapatan Asli Daerah Kabupaten Padeglang*. Skripsi tidak diterbitkan. Padeglang: Universitaas Agung Titrayasa.

telah ditetapkan dan membantu pendapatan masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor.³

Realisasi penerimaan sektor kehutanan di Kabupaten Gowa sudah melebihi target yang ditentukan, namun peningkatan penerimaan tiap tahunnya belum signifikan. Hal ini dikarenakan pemungutan hasil pendapatan asli daerah belum efektif, dimana kurangnya pengawasan, sosialisasi pegawai terhadap masyarakat sehingga masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan agar dapat menunjang pendapatan asli daerahnya sendiri.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa

No	Tahun	Target	Pencapaian
1.	2011	Rp. 335.000.000	Rp. 452.366.600
2.	2012	Rp. 350.000.000	Rp. 353.180.320
3.	2013	Rp. 280.000.000	Rp. 280.530.250
4.	2014	Rp. 280.000.000	Rp. 250.000.000

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Pada gambar diatas memperlihatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2012 target dan realisasi dari Dinas Kehutanan menurun diakibatkan berkurangnya sisa pungutan alam dikarenakan ditariknya Perda dari hasil hutan bukan kayu karna dikatan sebagai pungutan ganda, setelah terjadinya pengurangan sisa pungutan alam pada tahun 2013-2014 menurun.

³ Afriantho Guruh. 2008. *Prospek Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor*. Skripsi tidak di terbitkan. Bogor. Institut Pertanian Bogor (IPB).

Pemaparan diatas menggambarkan keefektifan pemungutan hasil pendapatan asli daerah yang belum optimal, dengan demikian hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang Keefektifan pemungutan dari Sektor Kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa, sehingga dapat dikaji agar Dinas Kehutanan jauh lebih mengoptimalkan hasil pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa.

Pengawasan adalah proses dalam menerapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni: bagaimanakah keefektifan penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa khususnya produksi getah pinus ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui bagaimanakah keefektifan penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa khususnya produksi hasil getah pinus.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat meneliti mengenai masalah keefektifan penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa.

b. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah Kabupaten Gowa agar kedepannya jauh lebih baik dalam meningkatkan keefektifan penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Keefektifan

Robbins menyatakan bahwa efektifitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara)⁴. Pemilihan itu mencerminkan efektifitas pemungutan hasil dari sektor kehutan, dengan demikian merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut hasil dari sektor kehutanan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan hasil pemungutan dari sektor kehutanan yang telah direncanakan. Mengukur efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai teori keefektifan, untuk lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

⁴ Robbins dalam Adam Ibrahim Indrawijaya. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 175.

Strees mengemukakan bahwa hal yang penting dalam proses pencapaian efektivitas adalah penggunaan sistem perspektif yang terbuka untuk melakukan analisa”⁵. Pendekatan tersebut menekankan hubungan antar bagian organisasi dengan lingkungannya. Dengan menggunakan perspektif ini, kita dapat mengidentifikasi empat kategori utama yang mempengaruhi efektivitas yaitu:

- a. Sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi
- b. Sifat lingkungan seperti kondisi ekonomi dan pasar
- c. Sifat karyawan seperti tingkat kinerja dan karyawan
- d. Kebijakan dan praktek manajerial

Gibson (dalam Waluyo, 2007: 89) menjelaskan lima kategori kriteria keefektifan mulai dengan dimensi waktu jangka pendek yaitu 1) kriteria produksi; 2) kriteria efisiensi; 3) kriteria kepuasan; 4) kriteria adaptasi; 5) kriteria pengembangan⁶. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kriteria Produksi

Kriteria ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.

2) Kriteria Efisiensi

Yaitu perbandingan keluaran terhadap pemasukan yang mengacu pada ukuran pengguna sumber daya yang langka dalam organisasi.

⁵ Strees dalam Waluyo. 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, hal. 89

⁶ Gibson dalam Waluyo. 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, hal. 89

3) Kriteria Kepuasan

Adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya, termasuk didalamnya para pelanggan dan rekan. Kepuasan mencakup sikap karyawan, pergantian karyawan, keabsenan, kelemburan dan keluhan.

4) Kriteria Keadaptasian

ialah tingkat dimana dapat dan benar-benar tangkap terhadap perubahan internal dan eksternal.

5) Kriteria Pengembangan

Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan.

Etzioni mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya System Model mencakup empat kriteria yaitu 1).adaptasi;2).integrasi; 3).motivasi dan 4).produksi⁷. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kriteria Adaptasi

Pada kriteria ini dipersoalkan kemampuan satu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan di sekitar organisasi. Untuk itu antara lain digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi.

⁷ Etzioni dalam Adam Ibrahim Indrawijaya. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 187.

Menurut Tampubolon, “kemampuan adaptasi ialah kesanggupan organisasi dalam melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan. Perubahan terjadi biasanya karena ada faktor dari luar ataupun di dalam organisasi.”⁸

2) Kriteria Integrasi

Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

Menurut Abu Ahmadi “integrasi sosial merupakan integrasi yang memiliki kerjasama dari keseluruhan anggota masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga dan masyarakat sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan nilai yang sama yang dijunjung tinggi.”⁹

3) Kriteria Motivasi Anggota

Dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

Menurut Azwar “motivasi merupakan sebuah rangsangan atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang ingin bekerjasama secara maksimal dalam melakukan sesuatu yang sudah direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan.”¹⁰

⁸ Manahan P. Tampubolon. 2004. *Manajemen Operasional*. Jakarta: Ghalia, hal. 77

⁹ Pretesia Sukma. *Materi Sosiologi Kelas XI Integrasi dan Reintegrasi Sosial*. <http://blog.unnes.ac.id/prasetia/2015/12/17/materi-sosiologi-kelas-xi-integrasi-dan-reintegrasi-sosial>. Diakses tanggal 25 agustus 2016

¹⁰ Seputar pengetahuan. 8 pengertian motivasi para ahli. <http://www.seputarpengertian.com/2015/03/8-pengertian-motivasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html>. Diakses tanggal 25 agustus 2016

4) Kriteria Produksi

Yaitu usaha pengukuran efektifitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Tampubolon menyatakan bahwa "produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas output organisasi yang sesuai dengan permintaan lingkungan."¹¹

Upaya yang dilakukan dalam pemungutan dari potensi sektor kehutanan agar bisa efektif, maka penetapan dan pemungutannya harus didukung dengan sistem pengawasan yang efisien.

Dari ketiga teori-teori diatas maka peneliti akan menggunakan teori keefektifan yang dikemukakan oleh Etzioni yang terdiri dari: 1) Kriteria Adaptasi; 2) kriteria Integrasi; 3) kriteria Motivasi dan 4) Kriteria Produksi.¹²

2. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan (revenues) berbeda dengan income. Revenues merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan Income adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. Income lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan.

Mardiasmo mengemukakan bahwa: Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

¹¹Manahan P. Tampubolon. *loc. cit.*

¹² *Ibid.*

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹³

Dalam sistem atau bentuk perekonomian khususnya perekonomian daerah, peran pemerintah daerah mutlak diperlukan tidak hanya sebagai penyedia akan jasa dan barang publik melainkan juga memelihara kestabilan ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki distribusi pendapatan di wilayah-wilayah daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai perundang-undangan. Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan di dapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah

Menurut Adrinai yaitu:

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat dirujuk, dan yang

¹³ Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, hal. 132

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.”¹⁴

Menurut Widyaningsih Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁵

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah ;

- a) Pajak daerah berasal dari Pajak Negara yang dipisahkan oleh daerah sebagai pajak daerah.
- b) Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah.
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku lainnya.

2. Hasil retribusi Daerah

Menurut Undnag-Undang Nomor 34 Tahun 2000¹⁶, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan
- b) Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang

¹⁴ Adrinai dalam Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 23

¹⁵ Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan pendekatan Mind Map*. Bandung: CV. Alfabeta, hal. 4

¹⁶ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah.

belum dimanfaatkan misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain.

- c) Retribusi Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 ayat (2) UU No.34 Tahun 2000)

Dari ketiga penggolongan retribusi tersebut diatas, hutan termasuk pungutan retribusi jasa yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD sedang perusahaan daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain usaha daerah yang sah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah maka daerah berhak mendapatkan sumber daerah itu sendiri. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah Daerah atau

dinas yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pendapatan daerah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Non Asli Daerah

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

3. Potensi Sektor Kehutanan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi bagian dari sumber daya alam, sumber daya alam maka sangatlah tepat jika dilakukan upaya atau cara untuk memanfaatkan, memberdayakan, memelihara dan melestarikan kekayaan alam yang berupa hutan melalui program pengelolaan hutan, sehingga dalam efektivitas pengelolaan hutan dapat ditentukan dengan tiga perspektif tersebut adalah : perspektif efisiensi, perspektif kualitas dan perspektif efektivitas.

Menurut Sugiono (2013:334) menyatakan bahwa potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah.¹⁷

Menurut Undang-Undang Kehutanan No.41/1999 menyebutkan bahwa hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

¹⁷ Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan biaya pajak dan retribusi dari pemanfaatan hasil hutan dan hasil kawasan hutan dan memasukkannya kedalam Anggaran Belanja daerah sebagai pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menjangkit pendapatan asli daerah melalui retribusi atau pajak pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan merupakan tujuan dari pengelolaan hutan.

Potensi sektor kehutan di kabupaten gowa yaitu hasil hutan bukan kayu, hasil hutan bukan kayu yang dimaksud adalah hasil getah yang diperoleh dari penyadapan getah pohon pinus yang saat ini berpotensi sebagai hasil pendapatan daerah di kabupaten gowa. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada lampiran

B. Kerangka Konseptual

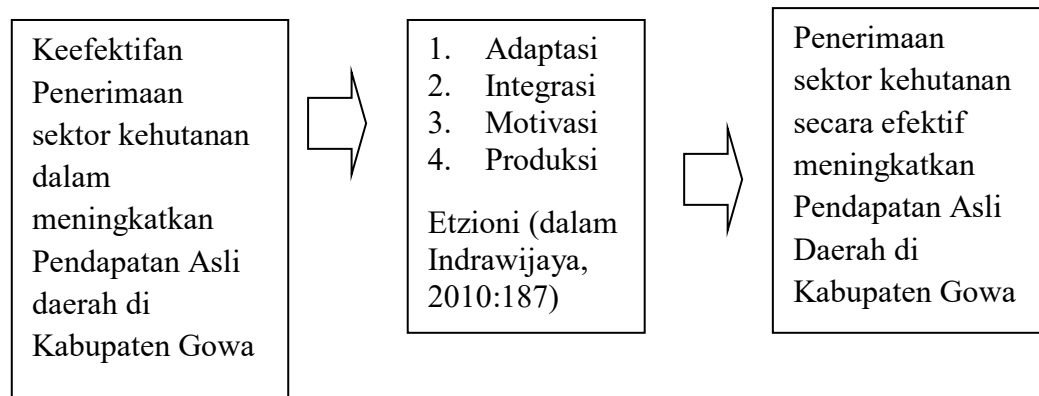
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali

potensi sumber daya alam yang berupa hasil dari sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah dan berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pertanian merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian nasional. Untuk itulah maka ditempuh salah satu kebijakan, yaitu menggali, menginventarisir dan membudidayakan hasil dari pertanian yang ada sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah. Suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD itu, salah satunya dengan mengembangkan dan membudidayakan sektor pertanian. Pengembangan disini yakni suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki. Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan sektor pertanian yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk lebih jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1 Skema Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Pendekatan ini dipilih dalam penelitian ini karena sangat sesuai untuk digunakan dalam meneliti mengenai Keefektifan penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa, dimana penelitian ini didasarkan pada informasi yang didapatkan melalui pengamatan yang terjadi dan beberapa informan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.¹⁸

Sugiyono mengemukakan bahwa :

“Metode kualitatif digunakan bila masalah penelitian belum jelas, masih reman-remang atau mungkin malah masih gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan

¹⁸ Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Dediknas. Hal. 11

dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas.”¹⁹

Tipe deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena sangat sesuai dengan penelitian mengenai Potensi Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa, dimana penelitian ini didasarkan pada situasi yang ada di lokasi penelitian kemudian menganalisa dan membandingkan kenyataan dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah wilayah yang akan dijadikan objek penelitian di Kabupaten Gowa.

Adapun lokasi penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu *Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Getah Pinus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa*, dilakukan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.

Pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini disebabkan oleh realisasi penerimaan dari sektor kehutanan di Kabupaten Gowa tidak efektif disetiap tahunnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

¹⁹ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 24.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Berikut ini adalah deskripsi fokus penelitian ini, yaitu:

- 1) Adaptasi merupakan indikator pertama dalam mengukur keefektifan, dimana dilakukan oleh para pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa menyesuaikan diri dalam kegiatan serta perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar hutan.
- 2) Integrasi merupakan indikator kedua dimana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa mampu untuk mengadakan sosialisai, pengembangan konsensus dan komunikasi terhadap para masyarakat di lingkungan sekitar hutan.
- 3) Motivasi merupakan indikator ketiga dimana keterikantan dan hubungan serta sarana dan prasarana di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa memadai sehingga adanya dorongan semangat kerja terhadap pegawai.
- 4) Produksi merupakan indikator terakhir dimana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dapat mengotimalkan hasil pendapatan asli daerah.

D. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian

Tahap-tahap kegiatan penelitian dilakukan dengan dua tahapan yaitu:

- 1) Tahap persiapan penelitian, dimana penulis melakukan observasi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, selanjutnya penulis mempersiapkan dan membuat pedoman wawancara terstruktur.

Menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang telah disusun, maka setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat atau merekamnya. Pedoman wawancara terstruktur yang telah disusun berisi pernyataan-pernyataan mendasar yang nantinya akan berkembang pada saat wawancara.

- 2) Tahap pelaksanaan penelitian, dimana pada tahap penelitian ini mulai dengan pengajuan surat izin penelitian di Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Makassar, kemudian surat izin penelitian diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gowa dan disetujui oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa sebagai lokasi yang dijadikan penelitian untuk bisa melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara maka langkah selanjutnya adalah dengan memantapkan data-data yang telah terkumpul dan mengkaji hasil observasi di lapangan.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini kalimat-kalimat ataupun tindakan-tindakan dari informan yang merupakan data primer dan tulisan-tulisan atau gambar/dokumentasi yang mendukung pernyataan informan. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan fokus pelaksanaan Potensi kehutanan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah kabupaten Gowa. Sugiyono mengemukakan bahwa informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayatinya.
- 2) Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- 3) Mereka yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi.
- 4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi Hasil “kemasannya” sendiri.
- 5) Mereka yang pada mulanya tergolong sebagai orang yang “cukup asing” akan peneliti sehingga lebih lanjut menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru atau narasumber.²⁰

Berdasarkan pendapat dari kriteria tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak dua orang
3. Manajer Administrasi Keuangan PT. Adimitra Pinus Utama

²⁰ Sugiyono, *Loc. cit*, 293

4. Polisi Hutan Sebanyak 1 orang

5. Tokoh Masyarakat sebanyak dua orang

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan–laporan, dokumen-dokumen, buku teks, yang ada baik pada instansi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gowa maupun sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

F. Instrument Penelitian

Instrument merupakan hal penting dalam melakukan penelitian kualitatif.

Sugiyono mengatakan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penelitian sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.²¹

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data dengan menggunakan pedoman wawancara dan menjadi sebagai peneliti oleh objek dan informan di lokasi penelitian.

G. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹ *Ibid*, hal. 223

1. Observasi (Pengamatan)

Metode ini digunakan mengingat bahwa dalam penelitian survai sangat perlu untuk melaksanakan observasi guna memperoleh data yang digunakan dalam penelitian serta gambaran dari gejala yang timbul atau kondisi yang sesungguhnya dilapangan. Gejala ini nantinya akan diformulasikan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa data.

2. Wawancara

Penggunaan metode ini dengan pertimbangan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, bahwa yang diperoleh melalui wawancara dari sejumlah informan yang akan bermanfaat guna mewujudkan validitas data secara keseluruhan dari responden dengan informasi yang diberikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian sebagai bukti nyata telah dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen, foto atau video yang diambil dalam pelaksanaan penelitian.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, yang dilakukan dengan cara:

1) Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain tetapi dengan teknik sama.

Data yang diperoleh melalui wawancara melalui informan yang ada selanjutnya dilihat kesesuaian informasi yang diberikan. Informasi yang dianggap sama dan relevan dari para informan akan dipilih dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

2) *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber datanya, tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh sumber data maka data tersebut *valid*. *Member check* dilakukan setelah pengumpulan data selesai atau setelah memperoleh kesimpulan.

I. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).²²

²² Miles dan Huberman dalam Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, hal. 246

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan memperbaharui data-data kasar yang ada pada catatan-catatan yang dihasilkan selama meneliti di lapangan sehingga dapat ditentukan informasi yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah diperoleh dari reduksi data disajikan dalam bentuk sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk teks paragraf. Pada tahap ini data yang relevan dengan masalah penelitian disusun sehingga dapat menjadi informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada data-data yang diperoleh selama penelitian sehingga data-data diuji validitasnya. Sehingga kebenaran kesimpulan dapat teruji kebenarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini digambarkan terlebih dahulu mengenai gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang telah ditempati sebelum memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

1. Kondisi Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa

Tinjauan terhadap aspek fisik wilayah, dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten Gowa dalam mengembangkan wilayahnya dimasa mendatang. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian, meliputi: aspek fisik wilayah, kependudukan dan sumberdaya manusia, aspek perekonomian, potensi bencana alam dan berbagai aspek lainnya.

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

2. Masa Kemerdekaan

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar.

Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah

Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.

3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap hutan.

a. Visi dan Misi

1. Visi

“Terwujudnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang Handal dalam Peringatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Menyelenggarakan Pemerintahan dalam Melestarikan SDA.”

2. Misi

1. Mengotimalkan fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, lindungi dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
2. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Mendorong peranserta masyarakat dalam proses perlindungan dan pemanfaatan hutan.
6. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.

7. Mengembangkan, membina dan memfasilitasi kepentingan petani perkebunan dan meningkatkan kesejahteraannya.
8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengusaha dalam pengembangan perkebunan.
9. Mengembangkan kelembagaan petani perkembangan pada sentra-sentra pengembangan perkebunan.
10. Meningkatkan kualitas produksi komoditi perkebunan.
11. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan yang handal.
12. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekspor yang kompetitif.

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa

1. Kepala Dinas

Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dinas

- b) Penyusunan strategis dinas
- c) Penyelenggaraan pelayanan urusan umum pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan.
- d) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas
- e) Menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan dinas
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaiaa, administrasi keuangan perencanaan pelaporan
- b) Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan perencanaan pelaporan
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian

3. Bidang pembinaan, Penertiban dan Perlindungan Hutan

Bidang Pembinaan, Penertiban dan Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan, Penertiban dan Perlindungan Hutan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis kegiatan Pembinaan, Penertiban dan Perlindungan Hutan
- b) Penyelenggaraan program kegiatan Bidang Pembinaan, Penertiban dan Perlindungan Hutan
- c) Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan, program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pembinaan, penertiban dan Perlindungan Hutan
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pembinaan, penertiban dan Perlindungan Hutan

4. Bidang Rehabilitasi dan Investasi Hutan dan Lahan

Bidang Rehabilitasi dan Investasi Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Investasi Hutan dan Lahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelapa Bidang mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi dan Investasi Hutan dan Lahan
 - b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang rehabilitasi dan Investasi Hutan dan Lahan
 - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Rehabilitasi dan Investasi Hutan dan Lahan
 - d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Rehabilitasi dan Investasi Hutan dan Lahan
5. Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Kahutanan dan Perkebunan

Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Kahutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Kahutanan dan Perkebunan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
 - b) Meyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
 - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
 - d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sseksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
6. Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan

Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal Bidang mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Peningkatan Produksi daan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan

- b) Penyelenggaraan program Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa informan dan data lain yang dapat mendukung penelitian ini. Potensi sektor kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa mencakup produksi usaha kayu, hasil hutan bukan kayu dan sadapan getah pinus. Kayu dan hasil hutan bukan kayu sudah tidak berpotensi lagi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dikarenakan peraturan daerahnya sudah dicabut (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000), sedangkan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten gowa adalah sadapan getah pinus.

Untuk mengetahui potensi sektor kehutanan pada sadapan getah pinus berikut ini disajikan hasil wawancara dengan para informan yang telah ditetapkan.

1. Adaptasi

- a. Perubahan iklim dalam kegiatan penggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Perubahan dari segi iklim yang sering terjadi. Sehingga dibutuhkan adaptasi agar tidak menghambat para tenaga kerja penyadap untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sektor kehutanan di Kab. Gowa

Pendapat informan mengenai perubahan dari segi iklim yang sering berubah terhadap hasil penyadapan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Gowa yang diungkapkan oleh bapak Henra selaku Manajer Administrasi Keuangan PT. Adimitra Pinus Utama yaitu: “Perubahan iklim sangat mempengaruhi proses kegiatan penyadapan, hasil produksi tergantung oleh iklim yang apabila curah hujan yang tinggi maka hasil yang akan di dapatkan kurang dan apabila cuaca panas maka hasil produksi meningkat dan para penyadap akan lebih mendapatkan hasil yang lebih banyak.” (wawancara pada hari Senin, 13 Juli 2016)²³

Hal yang serupa dinyatakan oleh Bapak Sabaruddin selaku pegawai dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa yaitu: ”hasil penerimaan dari sektor kehutanan dapat dipengaruhi oleh iklim, pertama curah hujan yang tinggi dan yang kedua tenaga kerja yang kurang diakibatkan curah hujan yang tinggi. jadi curah hujan yang tinggi dapat menghambat penyadapan dan tentunya

²³ Wawancara dengan Henra. Tanggal 13 Juli 2016

menghambat hasil penerimaan pendapatan asli daerah di Kab. Gowa” (wawancara pada hari Kamis, 9 Juni 2016)²⁴

Hal sama juga dikemukakan oleh Bapak Udin selaku Tokoh Masyarakat sekaligus penyadap yaitu: “Iklim memang sangat mempengaruhi aktivitas kami sebagai penyadap, karena dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan hasil getah yang kami peroleh sangat sedikit sedangkan jika musim panas kami para penyadap mendapatkan hasil getah yang banyak” (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016)²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap adaptasi perubahan iklim yang mempengaruhi kinerja para tenaga kerja penyadap dapat disimpulkan bahwa proses penyadapan getah pinus tetap berjalan sebagaimana mestinya dan para pekerja terkhususnya penyadap harus bisa menyesuaikan diri dengan baik terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim memang tidak dapat dihindari dan perubahan iklim juga mempengaruhi kinerja para pekerja karna hasil yang mereka dapatkan kurang dan mempengaruhi penghasilan para tenaga kerja atau penyadap, yang itu artinya akan menghambat penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kab. Gowa. Hal ini juga berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

²⁴ Wawancara dengan H. Sabaruddin, S.HUT. Tanggal 9 Juni 2016

²⁵ Wawancara dengan Udin. Tanggal 13 Juni 2016

- b. Tingkat penyesuaian pegawai dalam kegiatan menggali potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Tingkat penyesuaian pegawai dalam mengatasi perubahan iklim agar tidak menghambat kegiatan menggali potensi dari sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten gowa

Pendapat informan mengenai tingkat penyesuaian pegawai dalam kegiatan menggali potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kab.gowa yang diungkapkan oleh bapak Ahmad selaku polisi hutan pada dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa yaitu: “Dengan cara menambah tenaga kerja penyadap agar dapat memaksimalkan kembali penerimaan pendapatan asli daerah di Kab. Gowa, karena perubahan iklim sangat mempengaruhi pengasilan para tenaga kerja dan menghambat hasil dari penyadapan” (wawancara pada hari Kamis, 9 Juni 2016)²⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Rahman selaku pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu: “Dengan menambah tenaga kerja penyadap dan lebih memaksimalkan tingkat pengawasan para penyadap agar dapat melaksanakan kegiatan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kab. Gowa” (wawancara pada hari Kamis, 9 Juni 2016)²⁷

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tingkat penyesuaian pegawai dalam kegiatan mmenggali potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kab. Gowa dapat disimpulkan bahwa untuk peningkatan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah di Kab. Gowa dengan cara menambah tenaga

²⁶ Wawancara dengan Ahmad Nuryadin. tanggal 9 Juni 2016

²⁷ Wawancara dengan Rahman, S.T.P. tanggal 9 Juni 2016

kerja penyadap dan menambah polisi hutan yang mengawas secara langsung agar pelaksanaan kegiatan dalam menggali potensi dari sektor kehutanan bisa lebih efektif untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim yang tidak dapat dihindari, sehingga tidak menghambat penerimaan dari sektor kehutanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kab. Gowa. Hal ini juga berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

2. Integrasi

- a. Sosialisasi terhadap peningkatan penggalian potensi sektor kehutanan dalam meingkatkan pendapatan asli daerah

Sebelum melakukan proses penyadapan getah pinus Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat disekitar hutan. Sosialisasi yang dilakukan yaitu mengumpulkan perwakilan warga yang diyakini berperan penting dalam memberikan informasi kepada warga lainnya. Petugas yang datang bersosialisasi memberikan pengarahan mengenai proses penyadapan getah pinus yang sesuai dengan prosedur. Pegawai tidak hanya memberikan sosialisasi satu kali pertahun kepada masyarakat akan tetapi ada pula pengawas yang akan sering menghimbau ataupun memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih kurang memahami. pegawai yang bertugas akan menjelaskan lebih detail dan lebih mudah.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Salman selaku Kapala Seksi perencanaan Dinas Kahutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu: “Kami mengadakan sosialisasi setiap tahun di 9 kecamatan di gowa ada 18 kecamatan 9 dataran tinggi dan 9 kecamatan dataran rendah. Kabupaten 9 dataran tinggi inilah kawasan hutan

yang ada di kabupaten gowa. Satu kali kecamatan semua Stakeholder atau pemangku-pemangku kepentingan yang ada dilapangan termasuk kepala dusun dan kepala desa, dari setiap kecamatan itu kita kumpulkan untuk sosialisasi bukan hanya untuk pinus tapi dengan keseluruhan untuk perlindungan. Kami tidak serta merta melepas begitu saja, kami tetap memberi wewenang kepada pengawas yang telah ditunjuk untuk tetap menghimbau kepada para masyarakat sekitar kawasan hutan agar tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitaran kawasan hutan.” (wawancara pada hari Kamis, 9 Juni 2016)²⁸

Hal ini juga dijelaskan oleh Sabaruddin selaku pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu: ” Sosialisasi yang kita lakukan tidak hanya pertriwulan bahkan kami memberi wewenang kepada pengawas untuk sering menghimbau masyarakat yang masih belum mengerti dan menjelaskannya secara lebih rinci agar masyarakat sekitar kawasan hutan dapat lebih memahami akan pentingnya melestarikan hutan.” (wawancara pada hari Kamis, 9 Juni 2016)²⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kehutanan dilakukan tidak hanya setahun tapi juga pertriwulan dan tidak hanya itu, dinas kehutanan memberikan wewenang kepada pengawas yang ditunjuk untuk dapat menghimbaukan kepada masyarakat yang masih belum mengerti dan menjelaskan secara lebih rinci agar tidak menghambat jalannya kegiatan penyadapan dikawasan hutan dan tidak merusak lingkungan sekitaran hutan. Hal ini juga berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

²⁸ Wawancara dengan Salman SP,MM. tanggal 9 Juni 2016

²⁹ Wawancara dengan H. Sabaruddin, S.HUT. *loc. cit*

- b. Upaya Dinas kehutanan dan perkebunan dalam mengembangkan konsensus (kesepakatan) dengan stakeholder dalam enggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam prosedur kegiatan kerja akan lebih maksimal apabila sebelumnya ada kesepakatan yang menjadi landasan untuk bekerja. Hal demikian pula dilakukan oleh dinas kehutanan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan maupun para penyadap hutan pinus untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah di Kab. Gowa.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Salman selaku Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu: “Dengan cara mengadakan sosialisasi dengan para stakeholder disetiap daerah kami menerapkan hal tersebut, guna memberikan arahan mengenai cara melestarikan hutan dengan baik. Tidak hanya itu, kami juga menjelaskan kepada masyarakat agar kiranya tidak menghambat proses penyadapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kab. Gowa dan kepada penyadap apabila melakukan pelanggaran pada saat melakukan penyadapan kami akan memberikan teguran pertama, apabila teguran tidak diindahkan maka akan diberi teguran dan bisa saja kami akan memproses secara hukum serta akan mencabut hak penyadapan pada pohon pinus terebut.” (wawancara pada hari kamis, 9 Juni 2016).³⁰

Hal lain diungkapkan oleh bapak Amir selaku tokoh masyarakat yaitu: “Memang dinas kehutanan telah memberikan sosialisasi dan arahan dalam menjaga kelestarian hutan serta memberikan penjelasan apabila hutan pinus

³⁰ Wawancara dengan Salman SP,MM. *loc. cit*

adalah salah satu aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kab. Gowa yang masih digunakan sampai sekarang. Begitupun kesepakatan bagi para pekerja dan masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya menjaga kelestarian hutan, bukan hanya masyarakat sekitar hutan, pengunjung atau wisatawan juga belum memiliki kesadaran menjaga lingkungan sekitaran hutan. Dan masih ada pelanggaran dalam proses penyadapan, sehingga akan menimbulkan kerusakan hutan.” (wawancara pada senin, 13 Juni 2016).³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Upaya Dinas kehutanan dan perkebunan dalam mengembangkan konsensus (kesepakatan) dengan stakeholder dalam penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah belum efektif, karena masih ada masyarakat dan para pekerja yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Pelanggaran yang terjadi akan merusak lingkungan sekitar hutan dan akan menghambat penerimaan pendapatan asli daerah di kab. Gowa. Hal ini berdasarkan hasil observasi pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

c. Prosedur penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Semua stakeholder harus memahami prosedur penggalan potensi sektor kehutanan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan penyadapan ataupun penggalan potensi agar tidak menghambat jalannya kegiatan penerimaan dari sektor kehutanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kab. Gowa.

³¹ Wawancara dengan Amir. *loc. cit*

Hal ini jelaskan oleh bapak Udin selaku tokoh masyarakat yaitu: “Masih ada tenaga kerja penyadap yang minim akan pengetahuan dan kurang memahami proses penyadapan yang baik dan benar, contohnya cara menggores pohon biasanya hanya 20cm sedangkan masih ada yang menggores pohon lebih dari 20cm. Dan itu akan mengakibatkan kerusakan pohon dan merusak lingkungan.” (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016)³²

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Amir selaku tokoh masyarakat yaitu: “Masih ada tenaga kerja penyadap yang belum mengerti dan memahami cara dan proses penyadapan yang benar, meski telah diberikan sosialisasi. dan kurangnya polisi hutan yang mengawasi langsung dilokasi kawasan hutan.” (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016)³³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sangat sederhana dan belum cukup efektif sehingga masih ada tenaga kerja penyadap yang belum mengerti dan memahami cara atau prosedur penyadapan yang baik dan benar. Masih banyak terjadi proses penyadapan yang diluar dari prosedur serta kurangnya polisi hutan yang menjaga dan menertibkan setiap kegiatan penyadapan agar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini juga berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

³² Wawancara dengan Udin. *loc. cit*

³³ Wawancara dengan Amir. tanggal 13 Juni 2016

3. Motivasi

- a. Sarana dan prasarana sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah memadai

Sarana dan prasarana menjadi faktor terpenting dalam proses suatu kegiatan dan seharusnya sarana dan prasarana tersedia dengan baik, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik maka akan menghambat kegiatan. Namun, hal itu belum terjadi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa. Sarana dan prasarana yang digunakan masih kurang memadai sehingga masih adanya hambatan yang terjadi pada saat proses kegiatan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Salman selaku Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu: “Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada cukup memadai di kantor dinas, kami sudah memberikan fasilitas seperti melengkapi dengan alat pemadam kebakaran hutan seperti Jest suter, pompa air dan bak air disetiap kecamatan. Agar tidak menghambat kegiatan penyadapan.” (wawancara pada hari Kamis 9 Juni 2016)³⁴

Hal lain juga dijelaskan oleh bapak Sabaruddin selaku pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu: “Sarana dan prasarana yang diberikan oleh dinas kehutanan sudah memadai, sudah menyiapkan alat antisipasi kebakaran hutan. Hanya saja pengawas dari dinas kehutanan masih memakai kendaraan milik pribadi. Dan akses ke lokasi kawasan hutan sangat tidak memungkinkan menggunakan kendaraan milik pribadi, bisa merusak kendaraan.” (wawancara pada hari Kamis, 9 Juni 2016)³⁵

³⁴ Wawancara dengan Salman SP,MM. *loc. cit*

³⁵ Wawancara dengan H. Sabaruddin, S.HUT. *loc. cit*

Berdasarkan hasil wawancara telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana seperti alat antisipasi kebakaran hutan sudah dilengkapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa akan tetapi kendaraan yang digunakan untuk mengakses ke lokasi penyadapan bagi para pengawas dari Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa masih menggunakan kendaraan milik pribadi dan belum ada kendaraan dinas yang digunakan untuk mengakses ke lokasi penyadapan. Hal ini akan menjadi penghambat bagi para pegawai yang melaksanakan tugas dinas ke lokasi penyadapan. Hal ini berdasarkan observasi pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

- b. Apakah terdapat kendala dalam penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan PAD

Kendala dalam menggali potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kab. Gowa yaitu kurangnya tenaga kerja penyadap yang artinya berkurangnya hasil yang diperoleh dan kurangnya polisi hutan yang berarti tidak maksimalnya proses penyadapan dan penerimaan hasil sadapan dari sektor kehutanan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Amir selaku Tokoh masyarakat yaitu: “Kurangnya jumlah penyadap dikarenakan banyaknya penyadap yang berprofesi sebagai petani dan hanya menjadikan pekerjaan penyadap sebagai pekerjaan sampingan. Apabila pada musim panen maka para petani lebih memilih kembali kepada profesinya dan secara otomatis penyadap akan berkurang dan hasil yang diperoleh juga akan kurang. dan kurangnya polisi hutan untuk mengawasi kelancaran kegiatan penyadapan dengan baik. polisi hutan yang aktif di kawasan

hutan hanya satu orang, pasti akan sulit untuk mengawasi lahan seluas 11.996 Ha. Apalagi lahannya terletak di 5 Kecamatan yang berbeda. (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016)³⁶

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Udin selaku Tokoh masyarakat yaitu: “Sumber daya manusia yang masih kurang seperti kurangnya tenaga penyadap dan polisi hutan serta masih minimnya pengetahuan dalam proses penyadapan sehingga menghambat proses kegiatan penyadapan dan berkurangnya hasil penerimaan pendapatan asli milik daerah kab. Gowa.” (wawancara pada hari Senin 13 Juni 2016)³⁷

Berdasarkan hasil wawancara telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dilakukan dalam menggali potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kab. Gowa yaitu kurangnya sumber daya manusia yang masih kurang dan masih banyaknya tenaga penyadap yang masih belum memahami proses penyadapan dengan baik. Serta kurangnya polisi hutan yang mengawasi para penyadap di lokasi hutan. Dengan demikian semakin banyak penyadap yang tidak memahami prosedur penyadapan maka akan menimbulkan kerusakan hutan dan mengurangi pendapatan asli daerah di kab. Gowa. Hal ini berdasarkan observasi pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

- c. Interaksi para pegawai satu sama lain dalam proses kerja dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Interaksi para pegawai sangat berpengaruh dalam proses kerja sama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten gowa. Kurangnya integrasi

³⁶ Wawancara dengan Amir. *loc. cit*

³⁷ Wawancara dengan Udin. *loc. cit*

akan membuat proses kerja sama akan menjadi renggang dan menjadi penghambat terlaksanannya proses peningkatan pendapatan asli daerah.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Sabaruddin selaku pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu “Interaksi para pegawai sangat baik dan saling mendukung satu sama lain dalam proses kegiatan pelaksanaan tugas di dalam kantor maupun di luar kantor.” (wawancara pada hari Kamis, 9 Juni 2016)³⁸

Hal yang sama dijelaskan oleh bapak Rahman selaku pegawai Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu : “Para pegawai di dinas kahutanan dan perkebunan saling mendukung satu sama lain dalam bekerja, kerja sama yang sangat bagus dan terlebih rasa kekeluargaannya sangat erat.” (wawancara pada hari Kamis, 9 Juni 2016)³⁹

Berdasarkan hasil wawancara telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang perlu ditambah sehingga proses penyadapan dan pengawasannya bisa berjalan lebih efektif, dikarenakan masyarakat yang menjadi penyadap adalah petani yang menjadikan pekerjaan penyadapan sebagai pekerjaan sampingan selain bertani. sehingga mengakibatkan kurangnya hasil sadapan yang diperoleh serta minimnya pengetahuan para penyadap akan pentingnya mengetahui prosedur penyadapan yang baik dan benar agar tidak berdampak pada hutan. Serta interaksi para pegawai sudah sagat baik da saling mendukung satu sama lain dalam proses kerja. Hal ini berdasarkan hasil observasi pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

³⁸ Wawancara dengan Sabaruddin. *loc. cit*

³⁹ Wawancara dengan Rahman. *loc. cit*

4. Produksi

Menghasilkan hasil yang berkualitas dan banyak dari hasil penyadapan adalah salah satu tujuan utama dalam proses penyadapan untuk membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar kawasan hutan dan untuk menunjang pendapatan asli daerah yang akan diserahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa.

Hal ini diperjelas oleh Bapak Henra Selaku Manajer Administrasi Keuangan PT. Adimitra Pinus Utama yaitu: “Sampai saat ini tidak ada keluhan dari masyarakat atau para tenaga kerja penyadap, karena mereka diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan mereka atau hasil yang mereka peroleh akan kami berikan harga sebesar Rp 3.500/kg.” (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016)⁴⁰

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak udin selaku tokoh masyarakat yaitu: ” Sejauh ini, kami selaku masyarakat sekaligus penyadap tidak merasa terganggu melainkan sangat senang dengan hasil yang kami dapatkan, tidak hanya bertani tapi kami juga mempunyai kerja sampingan menjadi seorang penyadap yang ikut membangun daerah kami dengan cara meningkatkan hasil pendapatan daerah kami.” (wawancara pada hari Senin, 13 Juni 2016)⁴¹

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Sabaruddin selaku pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu: “Pada dasarnya yang menjadi penyadap disekitar wilayah hutan tidak lain adalah masyarakatnya itu sendiri. Mereka menjadikan penyadapan sebagai pekerjaan sampingan dari hasil bercocok tanam (petani) dan mereka sendiri yang menentukan berapa hasil yang mereka

⁴⁰ Wawancara dengan Henra. *loc. cit*

⁴¹ Wawancara dengan Udin. *loc. cit*

dapatkan dari getah itu pun yang mereka terima sebagai imbalan dengan ikut menjadi tenaga kerja penyadap untuk meningkatkan hasil produksi penyadapan.” (wawancara pada hari Kamis, 13 Juni 2016)⁴²

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Ahmad selaku Polisi hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa yaitu: “Sejauh ini semua masyarakat senang dengan adanya proses penyadapan ini yang artinya mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjadi tenaga kerja penyadap untuk membantu meningkatkan produksi hasil yang diperoleh.” (wawancara pada hari Kamis, 13 Juni 2016)⁴³

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa penggalan potensi dari sektor kehutanan di Kab. Gowa tidak mengganggu masyarakat sekitar hutan karena masyarakat sekitar hutan ikut mengambil bagian menjadi tenaga kerja penyadap yang memperoleh keuntungan dari hasil yang mereka dapatkan sebesar Rp. 3.500kg sesuai kemampuan mereka menyadap. Hasil yang diperoleh sudah maksimal, kebijakan yang telah dilakukan oleh perusahaan maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa sudah efektif untuk meningkatkan hasil pendapatan daerah dan penghasilan bagi masyarakat sekitaran kawasan hutan. berdasarkan hasil observasi pada hari Selasa, 14 Juni 2016.

⁴² Wawancara dengan H. Sabaruddin, S.HUT. *loc. cit*

⁴³ Wawancara dengan Ahmad Nuryadin. *loc. cit*

C. Pembahasan

Menurut Yani “PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁴

Menurut Herlina Rahman “Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.”⁴⁵

Dari kedua pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Upaya pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan teknologi proses pengolahan getah pinus yaitu dengan memberikan ijin membuat pabrik di Gowa agar memberikan nilai tambah, tidak lagi hanya menjual mentah getah yang diperoleh ke daerah tanpa nilai tambah dan tidak ada jaminan bagi petani untuk bisa menjadikan kegiatan penyadap getah pinus itu sebagai sumber mata pencaharian jangka panjang.

⁴⁴ Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, hal. 39

⁴⁵ Prima Mawitjere. Collage jurnal.

<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>. Diakses tanggal 29 Agustus 2016

Dengan mendirikan pabrik maka pemerintah Kabupaten Gowa sudah membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, ini juga termasuk usaha Pemda untuk menekan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Selain pemberdayaan pengangguran usaha ini mampu menekan ilegal logging dan kebakaran hutan, sedangkan tugas perusahaan pengelola diwajibkan menanam kembali bibit pinus pada lahan yang kosong. Hingga saat ini telah direalisasikan penanaman kembali sebanyak seratus ribu pohon lebih.

Dengan adanya proses penyadapan getah pinus ini petani merasa ikut memiliki hutan sebagai sumber pendapatannya, rendahnya pendapatan petani penyadap dikarenakan adanya budaya lokal bahwa menanam padi, sayur dan kopi masih dianggap sebagai pekerjaan pokok. Dengan kata lain sebagian petani penyadap sudah memiliki pekerjaan lain atau hanya sekedar kerja sampingan dan sebahagian lagi memang penyadap getah telah menjadi pekerjaannya. Dimana para petani yang ikut menjadi tenaga penyadap akan memberikan upah Rp. 3.500 per kg, harga tersebut memang tidak menetap, bisa tiba-tiba naik dan turun tergantung harga pasar. Setiap petani yang tekun akan mendapatkan upah sebesar 2-3 juta per bulannya dan petani yang kurang tekun bisanya hanya mendapatkan 1 juta per bulan. Dengan adanya proses penyadapan getah pinus dianggap sebagai penolong perekonomian bagi masyarakat sekitar kawasan hutan di kabupaten gowa.

Proses penerimaan hasil dari penyadapan getah pinus yang di kalukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dengan cara melakukan proses secara langsung oleh bendahara bagian Pendapatan Asli Daerah yang turun

langsung ke perusahaan yang berlandaskan pada laporan produksi setiap bulannya, setelah itu dibuatkan STP (Surat Tanda Terima) oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan disetor langsung ke bank. Sejauh ini hasil Pendapatan di Kabupaten Gowa sudah maksimal. Hanya saja penerimaan yang diterima setiap tahunnya menurun. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah Kab. Gowa dari sektor dinas kehutanan

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase (%)
1.	2011	Rp. 335.000.000	Rp. 452.366.600	135.03
2.	2012	Rp. 350.000.000	Rp. 353.180.320	100.90
3.	2013	Rp. 280.000.000	Rp. 280.530.250	100.18
4.	2014	Rp. 280.000.000	Rp. 250.000.000	89.28
5.	2015	Rp. 280.000.000	Rp. 339.513.000	121.25

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, Tahun 2016

1. Adaptasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran iklim sangat mempengaruhi hasil produksi dari getah pinus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kab. gowa, karena kurangnya penyadap dan iklim yang tidak dapat disiasati oleh dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa. Jadi kemampuan adaptasi dari penerimaan sektor kehutanan di Kab. Gowa masih belum efektif.

Menurut Tampubolon, “kemampuan adaptasi ialah kesanggupan organisasi dalam melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan. Perubahan terjadi biasanya karena ada faktor dari luar ataupun di dalam organisasi.”⁴⁶

⁴⁶ Manahan P. Tampubolon. *loc. cit.*

Adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi adalah pengaruh penting dalam keefektifan bekerja. Para tenaga penyardap harus menyesuaikan diri terhadap iklim agar bisa bekerja secara efektif.

Di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa, perubahan iklim mempengaruhi hasil dari penyardapan getah pada pohon pinus dan mengakibatkan para pekerja memperoleh hasil pada getah yang sedikit. Selama ini pekerja menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang sering terjadi, apabila curah hujan tinggi maka hasil yang mereka peroleh sedikit sedangkan dimusim panas para pekerja akan mendapatkan getah yang banyak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pekerja penyardap, serta perubahan iklim yang tidak dapat disiasati.

2. Integrasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa belum berdampak baik bagi masyarakat sekitar hutan dan para penyardap pada pohon pinus. Serta adanya kesepakatan yang dilanggar dan belum ada tanggapan dari pihak dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa. Jadi kemampuan integrasi dari penerimaan sektor kehutanan di Kab. Gowa masih belum efektif.

Menurut Abu Ahmadi “integrasi sosial merupakan integrasi yang memiliki kerjasama dari keseluruhan anggota masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga dan masyarakat sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan nilai yang sama yang dijunjung tinggi.”⁴⁷

⁴⁷ Pretesia Sukma. *loc. cit*

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dapat mempengaruhi keefektifan suatu proses kerja.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa sudah memberikan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan selama pertriwulan dalam satu tahun. Sosialisasi yang diberikan yaitu mengenai kelestarian hutan, menataan hutan dan lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa dalam mengembangkan konsensus (kesepakatan) yaitu dengan cara memberi arahan dan kesepakatan bagi para pekerja dan masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya menjaga kelestarian hutan, bukan hanya masyarakat sekitar hutan, pengunjung atau wisatawan juga belum memiliki kesadaran menjaga lingkungan sekitaran hutan. Dan masih ada pelanggaran dalam proses penyadapan, sehingga akan menimbulkan kerusakan hutan. Tetapi sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa pada para pelanggaran dalam proses penyadapan getah pinus. Disebabkan kurangnya pengawasan dan masih ada penyadap yang belum memahami prosedur penyadapan yang baik dan benar.

3. Motivasi

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan antar individu yang berjalan dengan baik, hanya saja sarana dan prasarana yang masih bersifat milik pribadi dan jumlah sumber daya manusianya masih sangat kurang sehingga kurangnya pengawas yang mengawasi kawasan hutan di kab. Gowa. Jadi

kemampuan motivasi dari penerimaan sektor kehutanan di Kab. Gowa masih belum efektif.

Menurut Azwar “motivasi merupakan sebuah rangsangan atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang ingin bekerjasama secara maksimal dalam melakukan sesuatu yang sudah direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan.”⁴⁸

Hubungan antar individu dalam suatu instansi dalam hal dapat memberikan motivasi dalam hasil kinerja. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu motivasi yang berpengaruh dalam proses kerja. Kinerja para tenaga kerja juga bergantung pada sarana yang ada sehingga bisa menghasilkan kerja yang efektif. Selain sarana dan prasarana

Di Dinas Kehutanan dan Perkebunan interaksi pegawai sudah sangat baik, hubungan antar individu terjalin dengan penuh dukungan dari satu sama lain sehingga adanya motivasi yang diberikan oleh tiap-tiap individu dalam meningkatkan kinerja masing-masing. Akan tetapi dari sarana dan prasarana yang masih bersifat milik pribadi, jumlah sumber daya manusia juga masih sangat kurang sehingga kurangnya pengawasan terhadap para pekerja di setiap kawasan hutan. Hal ini menghambat penyadapan, proses pengawasan dan tentunya akan menghambat penerimaan pendapatan asli daerah di kab. gowa.

⁴⁸ Seputar pengetahuan. *loc.cit*

4. Produksi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari penyadapan getah pinus sangat berkualitas sehingga diekspor keluar negeri untuk memperoleh hasil dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kab. Gowa dilihat dari meningkatnya pendapatan asli daerah. Serta berdampak baik pada perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan di kab. Gowa. Jadi kemampuan produksi dari penerimaan sektor kehutanan di Kab. Gowa sudah efektif.

Tampubolon menyatakan bahwa ”produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas output organisasi yang sesuai dengan permintaan lingkungan.”⁴⁹

Menghasilkan hasil yang berkualitas yang akan diekspor keluar negeri untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kab. Gowa. Penyadapan pada pohon pinus sendiri itu berdampak baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten gowa, tidak hanya itu penyadapan juga berdampak pada perekonomian masyarakat di kabupaten gowa itu sendiri sehingga tidak ada keluhan masyarakat terhadap proses penyadapan.

⁴⁹ Manahan P. Tampubolon. *loc. cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa belum terlaksana dengan efektif. Dilihat dari aspek Adaptasi terhadap kurangnya tenaga kerja penyadap dan iklim yang tidak dapat disiasati. Integrasi terhadap sosialisasi yang belum berdampak baik bagi para masyarakat dan para penyadap, sehingga masih adanya pelanggaran terhadap proses penyadapan yang tidak ditanggapi oleh dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa. Motivasi terhadap sarana dan prasarana yang masih bersifat milik pribadi dan jumlah sumber daya yang masih kurang. Namun pada aspek Produksi mengenai hasil yang berkualitas dilihat dari meningkatnya pendapatan asli daerah dan membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan yang berprofesi sebagai petani dalam proses penyadapan getah pinus. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

a. Adaptasi

Iklim sangat mempengaruhi hasil produksi dari getah pinus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kab. gowa, keraena kurangnya penyadap dan iklim yang tidak dapat disiasati oleh dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa. Jadi kemampuan adaptasi dari penerimaan sektor kehutanan di Kab. Gowa masih belum efektif.

b. Integrasi

Sosialisasi yang dilakukan dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa belum berdampak baik bagi masyarakat sekitar hutan dan para penyadap pada pohon pinus. Serta adanya kesepakatan yang dilanggar dan belum ada tanggapan dari pihak dinas kehutanan dan perkebunan kab. Gowa. Jadi kemampuan integrasi dari penerimaan sektor kehutanan di Kab. Gowa masih belum efektif.

c. Motivasi

Di dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten gowa, interaksi antar para pegawai yang sangat baik dan saling mendukung satu sama lain dalam proses kerja. Namun sarana prasarana masih bersifat milik pribadi dan sumber daya manusia yang masih kurang, sehingga kurangnya pengawasan terhadap para pekerja disetiap kawasan hutan pinus. Jadi kemampuan motivasi dari penerimaan sektor kehutanan di Kab. Gowa belum efektif.

d. Produksi

Namun hasil yang diperoleh dari penyadapan getah pinus sangat berkualitas sehingga diekpor keluar negeri untuk memperoleh hasil dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kab. Gowa dilihat dari meningkatnya pendapatan asli daerah. Serta berdampak baik pada perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan di kab. Gowa. Jadi kemampuan produksi dari penerimaan sektor kehutanan di Kab. Gowa sudah efektif.

B. Implikasi

Hasil penelitian mengenai keefektifan penerimaan sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten gowa (studi pada produksi usaha getah pinus) merupakan bukti ilmiah akan pentingnya meningkatkan keefektifan penerimaan dari sektor kehutanan agar kedepannya dapat memaksimalkan penerimaan hasil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten gowa secara maksimal.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang direkomendasikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kiranya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa lebih memperhatikan kondisi dan situasi lokasi penyadapan disetiap kawasan hutan pinus.
2. Sosialisasi sebaiknya dilakukan sesering mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tidak akan terdapat kendala dalam proses penyadapan
3. Kepada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa agar kiranya lebih memperhatikan cara penyadapan yang melanggar prosedur penyadapan di lapangan agar hutan tetap terjaga dengan baik.
4. Kiranya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia lebih ditingkatkan lagi dalam proses penyadapan getah pinus.
5. Kiranya dapat mnambah polisi hutan yang langsung mengawasi kawasan hutan agar tidak menjadi kendala di lokasi penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Dediknas
- . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Widjaja. 2001. *Otonomi daerah dan daerah Otonom*. Jakarta. Rajawali Pers
- Widyaningsih Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan pendekatan Mind Map*. Bandung: CV. Alfabeta
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada

B. Skripsi

- Afriantho Guruh. 2008. Prospek kontribusi hutan Rakyat Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor (Studi Kasus Hutan Rakyat Dikecamatan Nanggung). *Skripsi* tidak diterbitkan. Bogor. Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Sari Puspita Siti. 2010. Pengaruh Kinerja Dinas Kehutanan dalam Pengelolaan Potensi Hutan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padeklang Tahun 2009 (Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Padeklang). *Skripsi* tidak diterbitkan. Padeklang: Universitas Agung Titrayasa Serang

C. Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

D. Sumber lainnya

A. Mujetahid M. 2003. *Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara*. YP2K

Katalog Jurnal. 2009. Konsep Dasar Pengelolaan Hutan. (<http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-dasar-pengelolaan-hutan.html>). Diakses 04/01/2016

Makalaz ahmad. 2012. Pengertian Pengawasan. (<http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>). Diakses 13/03/2016

Muh. Tasrif Azkari. 2012. *Kebijakan Kehutanan pada Era Otonomi Daerah dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kelestarian hutan Kabupaten Gowa*. Unhas

Prestia Sukma. 2015. *Materi Sosiologi Kelas XI Integrasi dan Reintegrasi Sosial*. (<http://blog.unnes.ac.id/prasetia/2015/12/17/materi-sosiologi-kelas-xi-integrasi-dan-reintegrasi-sosial>). Diakses tanggal 25/08/2016

Seputar Pengetahuan. 2015. *8 Pengertian Motivasi Menurut Para Ahli Terlengkap*. (<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/8-pengertian-motivasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html>). Diakses tanggal 25/08/2016

Prima Mawidjere. 2013. Collage Jurnal. (<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>). Diakses tanggal 29/08-2016

LAMPIRAN

Lampiran 1

**MATRIKS PENELITIAN KEEFEKTIFAN PENERIMAAN SEKTOR
KEHUTANAN PRODUKSI GETAH PINUS DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA**

Judul	Rumusan Masalah	Fokus1	Sub Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa	Bagaimana keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa	keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kab. Gowa	1. Adaptasi 2. Integrasi 3. Motivasi 4. Produksi	1. Data primer berasal dari informan : a. Kepala Bidang Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan b. Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak dua orang c. Manajer Administrasi Keuangan PT. Adimitra Pinus Utama d. Polisi Hutan Sebanyak 1 orang e. Tokoh Masyarakat sebanyak dua orang 2. Data Sekunder	a. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan disain penelitian kualitatif b. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu, a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

KEEFEKTIFAN PENERIMAAN SEKTOR KEHUTANAN PRODUKSI
GETAH PINUS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN GOWA

1. Adaptasi

- a. Perubahan iklim dalam kegiatan penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?
- b. Bagaimana tingkat penyesuaian pegawai dalam kegiatan menggali potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?

2. Integrasi

- a. Dalam setahun berapa kali pegawai memberikan sosialisasi terhadap peningkatan penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?
- b. Bagaimana upaya Dinas Kehutanan dalam mengembangkan konsensus (kesepakatan) dengan stakeholder dalam penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?
- c. Apakah semua stakeholder kehutanan memahami prosedur penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?

3. Motivasi

- a. Apakah sarana dan prasarana sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah memadai ?
- b. Apakah terdapat kendala dalam penggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?
- c. Bagaimana interaksi para pegawai satu sama lain dalam proses kerja dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?

4. Produksi

- a. Apakah penggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah mengganggu kegiatan keseharian masyarakat sekitar lingkungan ?

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA**KEEFEKTIFAN PENERIMAAN SEKTOR KEHUTANAN
PRODUKSI GETAH PINUS DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA**

NO	FOKUS	PERTANYAAN	INFORMAN
1	Adaptasi	1. Apakah perubahan iklim yang terjadi menghambat kegiatan penggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? 2. Bagaimana tingkat penyesuaian pegawai dalam kegiatan menggali potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?	1. Manajer Administrasi Keuangan PT. Adimitra Pinus Utama 2. Polisi Hutan 3. Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	Integrasi	3. Dalam setahun berapa kali pegawai	1. Kepala Bidang Kasi Perencanaan Dinas

		<p>memberikan sosialisasi terhadap peningkatan penggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?</p> <p>4. Bagaimana upaya Dinas Kehutanan dalam mengembangkan konsensus (kesepakatan) dengan stakeholder dalam penggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?</p> <p>5. Apakah semua stakeholder kehutanan memahami prosedur penggalian potensi sektor kehutanan dalam</p>	<p>Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>2. Pegawai Dinas kehutanan dan Perkebunan</p> <p>3. Tokoh masyarakat</p>
--	--	--	---

		meningkatkan pendapatan asli daerah?	
3	Motivasi	<p>6. Apakah sarana dan prasarana sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah memadai?</p> <p>7. Apakah terdapat kendala dalam penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?</p> <p>8. Bagaimana interaksi para pegawai satu sama lain dalam proses kerja dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?</p>	<p>1. Kepala Bidang Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>2. Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>3. Tokoh masyarakat</p>

4	Produksi	9. Apakah penggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah mengganggu kegiatan keseharian masyarakat sekitar lingkungan?	<p>1. Manajer</p> <p>Administrasi</p> <p>Keuangan PT.</p> <p>Adimitra Pinus Utama</p> <p>2. Pegawai Dinas</p> <p>Kehutanan dan perkebunan</p> <p>3. Polisi hutan</p> <p>4. Tokoh Masyarakat</p>
---	----------	---	---

Lampiran 4

DAFTAR NAMA INFORMAN

a. Informan Pertama

1. Nama : Salman SP,MM
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kasi Perencanaan

b. Informan Kedua

1. Nama : H. Sabaruddin, S.Hut
2. Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pendapatan Asli Daerah

c. Informan Ketiga

1. Nama : Rahman, S.T.P
2. Pekerjaan : Staf Dinas kehutanan dan Perkebunan

d. Informan Keempat

1. Nama : Amir
2. Pekerjaan : Pengawas Penyadapan

e. Informan Kelima

1. Nama : Udin
2. Pekerjaan : Petani/Penyadap

f. Informan Keenam

1. Nama : Henra
2. Pekerjaan/Jabatan : Manajer Administrasi Keuangan PT. Adimitra
Pinus Utama

g. Informan Ketujuh

1. Nama : Ahmad Nuryadin
2. Pekerjaan/Jabatan : Polisi Hutan

Lampiran 5

MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA

KEEFEKTIFAN PENERIMAAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GOWA (STUDI PADA PRODUKSI USAHA GETAH PINUS)

Sub Fokus	Pertanyaan	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi Data
1. Adaptasi	a. Apakah perubahan iklim dalam kegiatan penggalian potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?	Henra	Perubahan iklim sangat mempengaruhi proses kegiatan penyadapan, hasil produksi tergantung oleh iklim yang apabila curah hujan yang tinggi maka hasil yang akan di dapatkan kurang dan apabila cuaca panas maka hasil produksi meningkat dan para penyadap akan lebih mendapatkan hasil yang lebih banyak.	Perubahan iklim memang tidak dapat dihindari oleh para penyadap, mereka harus tetap beradaptasi dengan iklim yang terjadi. Perubahan iklim sangat mempengaruhi hasil penyadapan getah dan mengakibatkan para penyadap memperoleh hasil yang sedikit dimana tingginya curah hujan berarti berkurangnya hasil sadapan yang diperoleh dan tentunya hal tersebut akan menghambat penerimaan PAD di
		Sabaruddin	hasil penerimaan dari sektor kehutanan dapat dipengaruhi oleh iklim, pertama curah hujan yang tinggi dan yang kedua tenaga kerja yang kurang diakibatkan curah hujan yang tinggi. jadi curah hujan yang tinggi dapat	

			menghambat penyadapan dan tentunya menghambat hasil penerimaan PAD Kab. Gowa	Kab. Gowa
		Udin	Iklim memang sangat mempengaruhi aktivitas kami sebagai penyadap, karena dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan hasil getah yang kami peroleh sangat sedikit sedangkan jika musim panas kami para penyadap mendapatkan hasil getah yang banyak.	
	b. Bagaimana tingkat penyesuaian pegawai dalam kegiatan menggali potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?	Ahmad	Dengan cara menambah tenaga kerja penyadap agar dapat memaksimalkan kembali penerimaan PAD Kab. Gowa, karena perubahan iklim sangat mempengaruhi pengasilan para tenaga kerja dan menghambat hasil dari penyadapan.	
		rahman	Dengan menambah tenaga kerja penyadap dan lebih memaksimalkan tingkat	

			pengawasan para penyadap agar dapat melaksanakan kegiatan dalam peningkatan PAD Kab. Gowa	
2. Integrasi	a. Dalam setahun berapa kali pegawai memberikan sosialisasi terhadap peningkatan penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?	Salman	Kami mengadakan sosialisasi setiap tahun di 9 kecamatan di gowa ada 18 kecamatan 9 dataran tinggi dan 9 kecamatan dataran rendah. Kabupaten 9 dataran tinggi inilah kawasan hutan yang ada di kabupaten gowa. Satu kali kecamatan semua Stakeholder atau pemangku-pemangku kepentingan yang ada dilapangan termasuk kepala dusun dan kepala desa, dari setiap kecamatan itu kita kumpulkan untuk sosialisasi bukan hanya untuk pinus tapi dengan keseluruhan untuk perlindungan. Kami tidak serta merta melepas begitu saja, kami tetap memberi wewenang kepada pengawas yang telah ditunjuk untuk tetap menghimbau kepada para masyarakat sekitar	Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa sudah sangat maksimal dikarenakan tidak hanya bersosialisasi juga memberikan wewenang kepada petugas pengawas yang ditunjuk untuk sering memberikan himbauan kepada masyarakat yang masih belum mengerti dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai kelestarian hutan, menataan hutan dan lainnya.

	b. Bagaimana upaya Dinas Kehutanan dalam mengembangkan konsensus (kesepakatan) dengan stakeholder dalam penggalan potensi sektor kehutanan dalam		kawasan hutan agar tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitaran kawasan hutan.	Upaya Dinas kehutanan dan perkebunan dalam mengembangkan konsensus (kesepakatan) dengan stakeholder dalam penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
		Sabaruddin	sosialisasi yang kita lakukan tidak hanya pertriwulan bahkan kami memberi wewenang kepada pengawas untuk sering menghimbau masyarakat yang masih belum mengerti dan menjelaskannya secara lebih rinci agar masyarakat sekitar kawasan hutan dapat lebih memahami akan pentingnya melestarikan hutan	
		Salman	Dengan cara mengadakan sosialisasi dengan para stakeholder disetiap daerah kami menerapkan hal tersebut, guna memberikan arahan mengenai cara melestarikan hutan dengan baik. Tidak hanya itu, kami juga menjelaskan kepada masyarakat agar kiranya tidak menghambat proses	

	meningkatkan pendapatan asli daerah?		penyadapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kab. Gowa dan kepada penyadap apabila melakukan pelanggaran pada saat melakukan penyadapan kami akan memberikan teguran pertama, apabila teguran tidak diindahkan maka akan diberi teguran dan bisa saja kami akan memproses secara hukum serta akan mencabut hak penyadapan pada pohon pinus tersebut.	belum efektif, karena masih ada masyarakat dan para pekerja yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Pelanggaran yang terjadi akan merusak lingkungan sekitarah hutan dan akan menghambat pendapatan asli daerah dikab. Gowa.
		Amir	Memang dinas kehutanan telah memberikan sosialisasi dan arahan dalam menjaga kelestarian hutan serta memberikan penjelasan apabila hutan pinus adalah salah satu aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kab. Gowa yang masih digunakan sampai sekarang. Begitupun kesepakatan bagi para pekerja dan masyarakat sekitar hutan.	

	c. Apakah semua stakeholder kehutanan memahami prosedur penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?		Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya menjaga kelestarian hutan, bukan hanya masyarakat sekitar hutan, pengunjung atau wisatawan juga belum memiliki kesadaran menjaga lingkungan sekitaran hutan. Dan masih ada pelanggaran dalam proses penjadapan, sehingga akan menimbulkan kerusakan hutan.	Meskipun sudah diberi sosialisasi akan tetapi masih ada tenaga kerja penjadap yang belum mengerti proses penjadapan getah yang benar dan masih kurangnya polisi yang mengawasi secara langsung di lokasi kawasan hutan.
		Udin	Meski sudah diberi sosialisasi akan tetapi masih ada tenaga kerja penjadap yang minim akan pengetahuan dan kurang memahami proses penjadapan yang baik dan benar, cara menggores pohon biasanya hanya 20cm sedangkan masih ada yang menggores pohon lebih dari 20cm. Dan itu akan mengakibatkan kerusakan pohon dan merusak lingkungan.	

		Amir	Masih ada tenaga kerja penyadap yang belum mengerti dan memahami cara dan proses penyadapan yang benar, meski telah diberikan sosialisasi. dan kurangnya polisi hutan yang mengawasi langsung dilokasi kawasan hutan.	
3. Motivasi	a. Apakah sarana dan prasarana sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah memadai ?	Salman	Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada cukup memadai di kantor dinas, kami sudah memberikan fasilitas seperti melengkapi dengan alat pemadam kebakaran hutan seperti Jest suter, pompa air dan bak air disetiap kecamatan. Agar tidak menghambat kegiatan penyadapan.	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan hanya seadanya dan bersifat milik pribadi. Selain sarana dan prasarana, jumlah sumber daya juga masih sangat kurang, sehingga kurangnya pengawasan terhadap para pekerja disetiap kawasan hutan pinus.
		Sabaruddin	Sarana dan prasaran yang diberikan oleh dinas kehutanan sudah memadai, hanya saja pengawas dari dinas kehutanan masih memakai kendaraan milik pribadi. Dan akses ke lokasi	

			kawasan hutan sangat tidak memungkinkan menggunakan kendaraan milik pribadi, bisa merusak kendaraan dan Dinas Kehutanan sudah menyiapkan alat antisipasi kabakaran hutan.	
	b. Apakah terdapat kendala dalam penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?	Amir	Kurangnya jumlah penyadap dikarenakan banyaknya penyadap yang berprofesi sebagai petani dan hanya menjadikan pekerjaan penyadap sebagai pekerjaan sampingan. Apabila pada musim panen maka para petani lebih memilih kembali kepada profesinya dan secara otomatis penyadap akan berkurang dan hasil yang diperoleh juga akan kurang. dan kurangnya polisi hutan untuk mengawasi kelancaran kegiatan penyadapan dengan baik. polisi hutan yang aktif di kawasan hutan hanya satu orang, pasti akan sulit untuk mengawasi lahan seluas 11.996 Ha. Apalagi lahannya	

			terletak di 5 Kecamatan yang berbeda.	
		Udin	sumber daya manusia yang masih kurang seperti kurangnya tenaga penyadap dan polisi hutan serta masih minimnya pengetahuan dalam proses penyadapan sehingga menghambat proses kegiatan penyadapan dan berkurangnya hasil penerimaan pendapatan asli milik daerah kab. Gowa	
	c. Bagaimana interaksi para pegawai satu sama lain dalam proses kerja dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?	Sabaruddin	Interaksi para pegawai sangat baik dan saling mendukung satu sama lain dalam proses kegiatan pelaksanaan tugas didalam kantor maupun diluar kantor.	Interaksi para pegawai sudah sagat baik dan saling mendukung satu sama lain dalam proses kerja atau tugas didalam maupun diluar kantor.
		Rahman	Para pegawai di dinas kahutanan dan perkebunan saling mendukung satu sama lain dalam bekerja, kerja sama yang sangat bagus dan terlebih rasa kekeluargaannya sangat erat.	

4. Produksi	a. Apakah penggalan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah mengganggu kegiatan keseharian masyarakat sekitar lingkungan ?	Henra	Selama ini masyarakat tidak merasa terganggu, karena mereka kebanyakan ikut serta dalam kegiatan menyadap sehingga membantu memperbanyak hasil produksi yang dihasilkan dari hasil sadapan.	Menghasilkan hasil yang berkualitas yang akan diekspor keluar negeri. Meskipun masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti bahwa pohon pinus yang ada di kabupaten gowa sangat menghasilkan, bukan terletak pada kayunya tapi pada getah yang dihasilkan oleh pohon pinus. Penyadapan padah pohon pinus sendiri itu berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat di kabupaten gowa itu sendiri sehingga tidak ada keluhan masyarakat terhadap proses penyadapan getah pinus.
		Udin	Sejauh ini, kami selaku masyarakat sekaligus penyadap tidak merasa terganggu melainkan sangat senang dengan hasil yang kami dapatkan, tidak hanya bertani tapi kami juga mempunyai kerja sampingan menjadi seorang penyadap yang ikut membangun daerah kami dengan cara meningkatkan hasil pendapatan daerah kami.	
		Sabaruddin	Pada dasarnya yang menjadi penyadap disekitar wilayah hutan tidak lain adalah masyarakatnya itu sendiri. Mereka menjadikan penyadapan sebagai	

		pekerjaan sampingan dari hasil bercocok tanam (petani) dan mereka sendiri yang menentukan berapa hasil yang mereka dapatkan dari getah itu pun yang mereka terima sebagai imbalan dengan ikut menjadi tenaga kerja penyadap untuk meningkatkan hasil produksi penyadapan.	
Ahmad		Sejauh ini semua masyarakat senang dengan adanya proses penyadapan ini yang artinya mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjadi tenaga kerja penyadap untuk membantu meningkatkan produksi hasil yang diperoleh.	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 2468/UN36.6/DL/2016

25 Mei 2016

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul Skripsi
dan Pembimbing

Yth. : Sdr. **Dendi Hardiyanti Sophian**
di Makassar

Stambuk : 1265142007

Berdasarkan surat permohonan Saudara tertanggal 25 Mei 2016 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat ini, maka dengan ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa rencana skripsi berjudul:

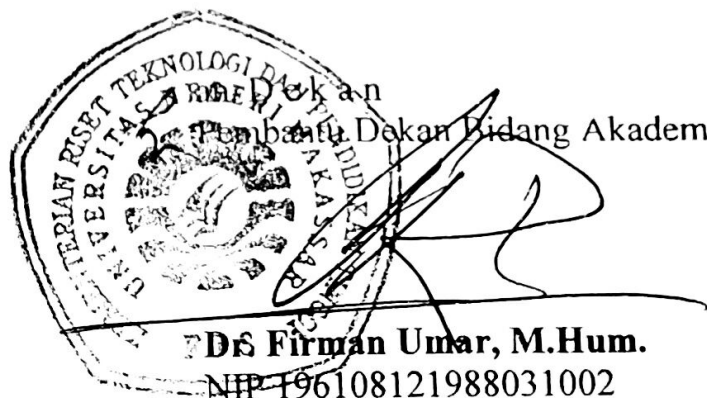
Potensi Sektor Kehutanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa.

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si.
2. Ismail, S.Pd., M.Si.

Dapat disetujui dan dinyatakan SAH.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.


Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,
Dr. Firman Umar, M.Hum.
NIP. 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 2469/UN36.6/PI/2016

25 Mei 2016

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan
Penelitian

Yth. : **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini, dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: **Kabupaten Gowa** dalam rangka penulisan skripsi.

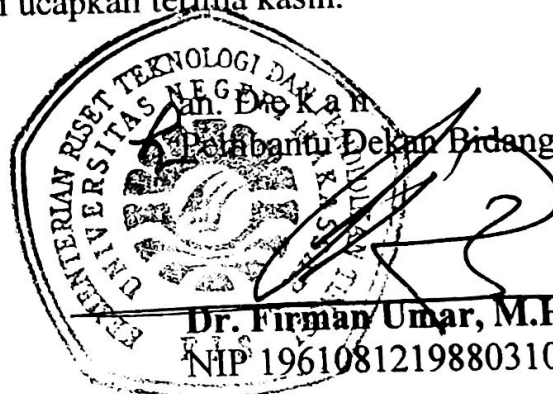
N a m a : **Dendi Hardiyanti Sophian**
S t a m b u k : 1265142007
Jurusan/Program Studi : Ilmu Admi41nistrasi Negara

Dosen Pembimbing :
1. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si.
2. Ismail, S.Pd., M.Si.

Masalah yang diteliti :

Potensi Sektor Kehutanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.


An. Dr. Firman Umar,
Pelaksana Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. Firman Umar, M.Hum.
NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 6 Juni 2016

K e p a d a

Nomor : 070/1221/BKB.P/2016
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. 1. Ka. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Ka. Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kab. Gowa
Masing-masing
Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 6703/S.01.P/P2T/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Dendi Hardianti Sophian**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar 17 Januari 1994
Jenis kelamin : **PEREMPUAN**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BTN. Andi Tonro Permai A4 No. 08

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **"POTENSI SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GOWA"**.

Selama : 30 Mei s/d 30 juli 2016
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

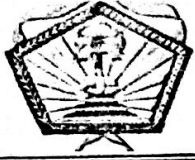
An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,



KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Pembantu Dekan Bid. Akademi FIS UNM Makassar
3. Yang bersangkutan;
- .. Peringgal.-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Beringin Telp/Fax (0411) 868261 Sungguminasa Kabupaten Gowa 92111

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisyah, SP
Pangkat/Gol : Penata – III/c
Nip : 197511162008012014
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gowa

Menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Dendi Hardianti Sophian
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 17 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Benar telah mengadakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyelesaian skripsi/tesis yang berjudul “ Potensi Sektor Kehutanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa “

Demikian surat keterangan kami buat, dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

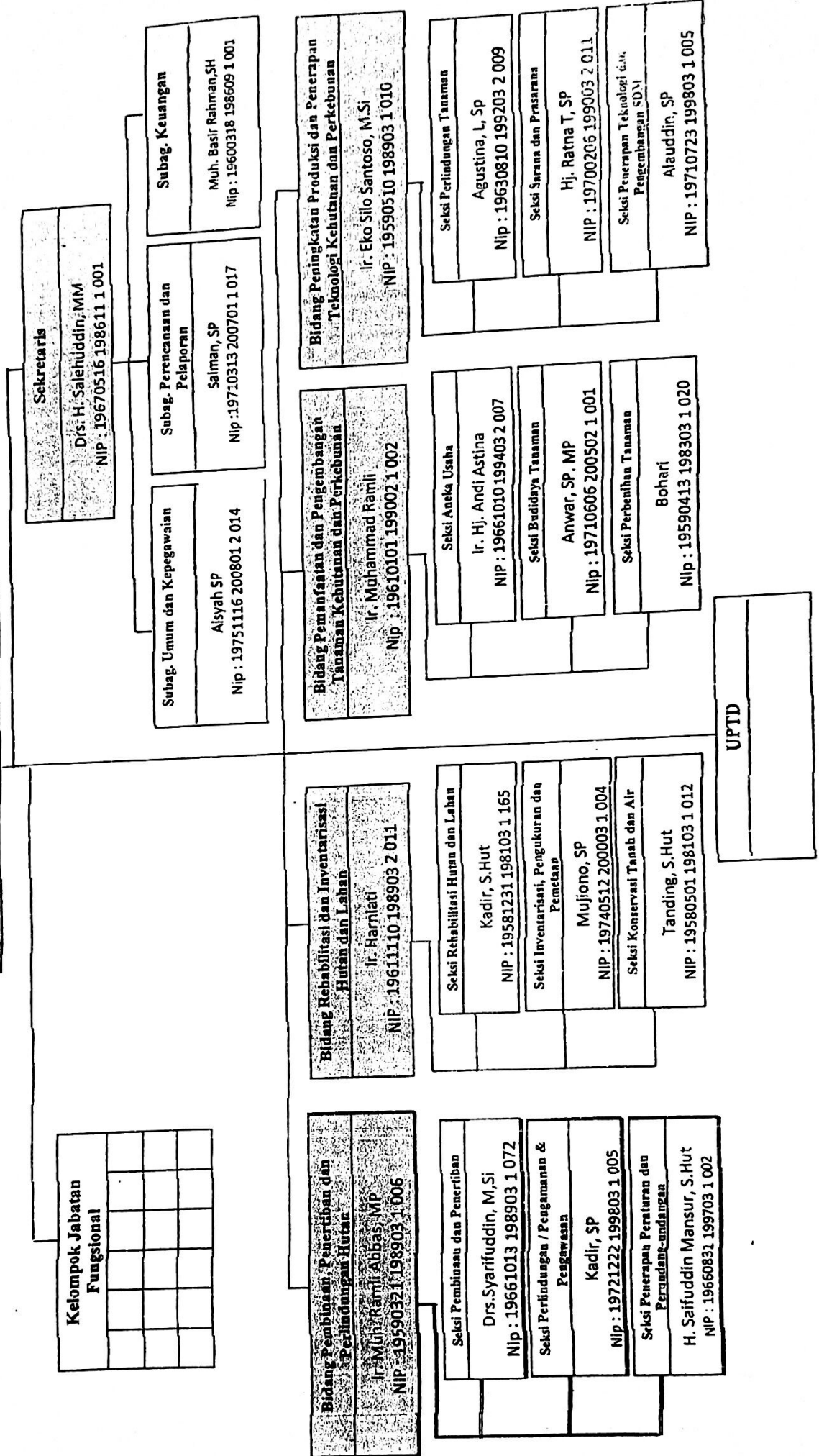
Aisyah, SP

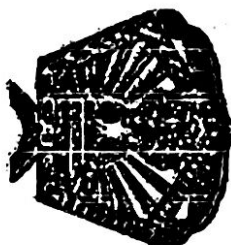
Pangkat : Penata
Nip : 197511162008012014



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal : 28 Juli 2008





**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa getah pinus merupakan salah satu produksi usaha Pemerintah Kabupaten Gowa yang menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimanfaatkan serta pengenaan biaya/tarifnya perlu ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 109);

9. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Penjualan
Produk Usaha Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2011 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -
KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 17),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi
Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Bibit Tanaman

1. Bibit Kelapa Hibrida Rp700,00/cikal
2. Bibit Kelapa Dalam Rp300,00/cikal
3. Bibit Kopi Rp150,00/pohon
4. Bibit Kakao Rp250,00/pohon
5. Bibit Jambu Mente Rp100,00/pohon

b. Bibit Tanaman Kayu-Kayuan

1. Mahoni dan sejenisnya (Gamalia, trembesi, jabon, suren, Johor, Bangong Jawa, Annonng, Biti, Pinus dst) Rp100,00/pohon
2. Jati Lokal Rp300,00/pohon
3. Jati Super Rp700,00/pohon

c. Bibit Sapi (Usia 1 Tahun)

1. Jantan Rp1.750.000,00/ekor
2. Betina Rp1.500.000,00/ekor

d. Bibit Ikan

1. Ikan Mas ukuran 2-3 cm Rp100,00/ekor
ukuran 3-5 cm Rp200,00/ekor
ukuran 5-8 cm Rp400,00/ekor
ukuran 8-12 cm Rp1.500,00/ekor

2. Ikan Nila ukuran 2-3 cm

- ukuran 3-5 cm Rp100,00/ekor
ukuran 5-8 cm Rp200,00/ekor
ukuran 8-12 cm Rp400,00/ekor
Rp1.200,00/ekor

3. Ikan Lele ukuran 2-3 cm

- ukuran 3-5 cm Rp100,00/ekor
ukuran 3-5 cm Rp250,00/ekor

4. Ikan Konsumsi

- a. Ikan mas Rp25.000,00/kg
- b. Nila Rp20.000,00/kg
- c. Lele Rp15.000,00/kg

e. Beni Padi Non Hibrida

Rp2.500,00/kg

f. Sadapan Getah

Getah Pinus

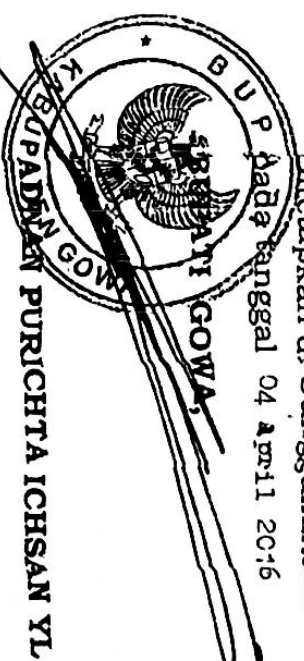
Rp350,00/kg

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 04 April 2016



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 04 April 2016



NOMOR 04
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
B.HK.HAM.3.26.16



BUPATI GOWA

REKOMENDASI

Nomor : 503/026/Ekonomi

**TENTANG
IZIN PENYADAPAN GETAH PINUS
PT. ADIMITRA PINUS UTAMA**

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 068/AP/X.II/2006, tanggal 11 Desember 2006 perihal Permohonan Sadapan Getah Pinus dengan memperhatikan pertimbangan teknis, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Gowa mendukung/menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan Penyadapan Getah Pinus di Kabupaten Gowa seluas 11.996 Ha (rincian terlampir) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyadapan Getah Pinus harus menjaga kelestarian hutan pinus dan ekosistem pada kawasan hutan ;
2. Memberdayakan Tenaga Kerja Gerilyawan Hutan dan mewakili Masyarakat di Sekitar Hutan dengan Proporsional 70 : 30 ;
3. Membangun/ menyiapkan barak bagi Gerilyawan Hutan sesuai kebutuhan ;
4. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau tahun kedua harus mendirikan Patuk Gondorukem dan Terpentin yang selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Derivat Gondorukem ;
5. Melengkapi mengurus SITU, SIUP/TDP dan perizinan lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Rekomendasi ini berlaku selama 10 (Sepuluh) tahun, setiap tahun dievaluasi dan dapat diperpanjang kembali ;
7. Hal-hal yang menyangkut Teknik Operasional akan diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini ;
8. Apabila ketentuan poin 1 s/d 7 diatas tidak dilaksanakan, maka Pemerintah kabupaten Gowa dapat melakukan pencabutan sepihak Rekomendasi ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, Maret 2007

Bupati Gowa



H. ICHSAN YASIN LIMPO, SH

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sul-Sel Cq. Kepala Dinas Kehutanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Gowa
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa
4. Para Camat masing-masing
5. Peringgal

di Makassar
di Sungguminasa
di Sungguminasa
di Tempat

**PERJANJIAN KERJASAMA PENYADAPAN GETAH PINUS
DI KABUPATEN GOWA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**ANTARA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GOWA
DENGAN
PT. ADIMITRA PINUS UTAMA**

Nomor : 522.2/257V/2007/Dishut

Pada hari ini, Senin tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua ribu Tujuh bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. M. Yusuf, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa
Alamat : Jl. Beringin No. 1 Sungguminasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Ir. H. Tjuk Budi Utomo, MM
Jabatan : Direktur Utama PT. Adimitra Pinus Utama
Alamat : Jl. Poros Tombolo No. 50 Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Adimitra Pinus Utama, berdasarkan Akte Notaris Nomor : 22 tanggal 17 Maret 2007. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; _____
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatannya ; _____
- (3) Surat Bupati Gowa Nomor : 503/028/Ekonomi, tanggal 22 Maret tahun 2007, tentang Rekomendasi Izin Penyadapan Getah Pinus PT. Adimitra Pinus Utama pada kawasan Hutan Pinus Di Kabupaten Gowa. _____

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut para pihak, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal pemanfaatan tegakan pinus dengan cara melakukan penyadapan getah dalam di wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : _____

**REVISI
PERJANJIAN KERJASAMA PENYADAPAN GETAH PINUS
DI KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ANTARA

**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN GOWA**

DENGAN

PT. ADIMITRA PINUS UTAMA

Nomor : 666 / A-4 / Dishutbun

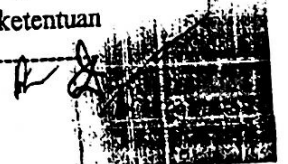
Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu Bulan Desember tahun dua ribu sepuluh bertempat di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. Nama : Ir. Djamaluddin Maknun, MP. -----
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa -----
Alamat : Jl. Beringin No. 1 Sungguminasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. -----
Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA -----
2. Nama : Susanto Gunawan -----
Jabatan : Direktur Utama PT. Adimitra Pinus Utama -----
Alamat : Jl. Poros Tombolo No. 50 Malino, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan -----
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Adimitra Pinus Utama, berdasarkan Akte Notaris Nomor : 22 tanggal 17 Maret 2007. -----
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA -----

DASAR REVISI PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; -----
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatannya; -----
- (3) Surat Bupati Gowa Nomor : 503/026/Ekonomi, tanggal 22 Maret tahun 2007, tentang Rekomendasi Izin Penyadapan Getah Pinus PT. Adimitra Pinus Utama pada kawasan Hutan Pinus di Kabupaten Gowa -----
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama Penyadapan Getah Pinus di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dengan PT. Adimitra Pinus Utama Nomor : 522.2/25/V/2007/Dishut, tanggal 14 Mei tahun 2007 -----
- (5) Rekomendasi Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, Nomor : 839/A.9/Dishutbun, tanggal 01 Oktober 2010 tentang System Penyadapan Getah Pinus -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut para pihak, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat untuk melakukan revisi perjanjian kerjasama nomor 522.2/25/V/2007/Dishut, dalam hal pemanfaatan tegakan pinus dengan cara penyadapan getah dalam wilayah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut : -----





1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 6 8 8 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 6703/S.01.P/P2T/05/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar Nomor : 2469/UN36.6/PU/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **DENDI HARDIYANTI SOPHIAN**
Nomor Pokok : 1265142007
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. AP. Pettarani, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" POTENSI SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Mei s/d 30 Juli 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 Mei 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth
1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar;
2. Peninggal.



Lampiran 18

DOKUMENTASI PENELITIAN



KANTOR DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GOWA



PROSES KEGIATAN DI RUANGAN UMUM DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GOWA



LOKASI PENYADAPAN GETAH PINUS DI KABUPATEN GOWA



PROSES PEROBEBKAN PADA POHON PINUS DAN PENYEMPROTAN
(ASAM SULFAT, FOSFORIT DAN HCL) UNTUK PERANGSANG
KELUARNYA GETAH DARI POHON PINUS



PROSES PENGUMPULAN GETAH DARI POHON PINUS



PROSES WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKSI PERENCANAAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GOWA



PROSES WAWANCARA DILOKASI PENYADAPAN POHON PINUS



HASIL PRODUKSI HASIL GETAH PINUS YANG TELAH DIOLAH MENJADI
GONDORUKEM



HASIL PRODUKSI HASIL GETAH PINUS YANG TELAH DIOLAH MENJADI
TERPENTIN



DRUM GONDORUKEM DAN TERPENTIN DALAM PABRIK GETAH PINUS



PROSES PENGOLAHAN GETAH PINUS

RIWAYAT HIDUP



Dendi Hardiyanti Sophian. Lahir di Makassar pada tanggal 17 Januari 1994. Anak Keempat dari lima bersaudara dari pasangan Ir. Muh. Zulfikar Sophian dan ST. Roslina Patau S.Pd. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2000 di SD Negeri Katangka Makassar

dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 21 Makasar dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Makassar dan tamat pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan bekerja ke PT. Produntial Life Assurance sebelum melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada tahun 2012.